

Pancasila dalam Konteks Perjuangan Bangsa Indonesia

Kamdani^{1*}, Dina Ramayani², M. Ripaldo Siregar³, Nazhimatul Fadiyah⁴

¹⁻⁴ Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Program Studi Ilmu Hadits, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat Kampus: Jl William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis : kamdani4003004@uinsu.ac.id

Abstract. *This research uses descriptive qualitative methods to describe and understand Indonesian historical phenomena, especially the values of Pancasila during the Sriwijaya and Majapahit kingdoms. During the Srivijaya kingdom, the values of Pancasila were reflected, such as divinity with harmony between religions, humanity with good relations between Sriwijaya and India, and unity in a wide area. During the Majapahit era, the principles of Pancasila were also reflected, especially in divine and humanitarian values which were reflected in religious tolerance and good international relations. Apart from that, popular principles and social justice are visible through a government system that prioritizes deliberation and the welfare of the people. This research reveals how these principles have become the basis of the Indonesian state which has been reflected since the kingdom era.*

Keywords: *Pancasila, System Of Government, Foundation Of The Indonesian State*

Abstrak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan memahami fenomena sejarah Indonesia, khususnya nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa kerajaan Sriwijaya, nilai-nilai Pancasila sudah tercermin, seperti ketuhanan dengan keharmonisan antar agama, kemanusiaan dengan hubungan baik antara Sriwijaya dan India, serta persatuan dalam wilayah yang luas. Di masa Majapahit, sila-sila Pancasila juga tercermin, terutama dalam nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang tercermin dalam toleransi beragama dan hubungan internasional yang baik. Selain itu, sila kerakyatan dan keadilan sosial terlihat melalui sistem pemerintahan yang mengedepankan musyawarah dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut telah menjadi dasar negara Indonesia yang tercermin sejak masa kerajaan.

Kata Kunci: Pancasila, Sistem Pemerintahan, Dasar Negara Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia, sebelum pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada masyarakat bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai

tersebut telah ada sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka dan telah masyarakat amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga nilai-nilai pancasila sendiri berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pejuang kemerdekaan menjadi dasar negara republik Indonesia. Proses perumusan dasar negara tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama, sidang panitia 9, dilanjutkan dengan sidang kedua serta disahkannya pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

Pancasila adalah pedoman bangsa Republik Indonesia. Suatu pegangan bangsa Indonesia yang menganut sebagai kekuatan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia adil dan makmur. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara yang telah diterima oleh seluruh warga negara Indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu merupakan kepribadian negara dan cara pandang hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuannya, Sehingga tidak ada kekuatan apapun yang mampu memisahkan Pancasila dan Indonesia dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagai mana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni. 9 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan. Oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar Negara.

Pancasila dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatarbelakangi terbentuknya NKRI dan dasar negaranya yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara dari zaman hindu, budha, dan islam. Sejarah perjuangan dan berdirinya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya berjalan sejak sekian abad yang lalu, dengan berbagai cara dan bertahap dengan itu sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempunyai hubungannya dengan sejarah lahirnya Pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sosial atau budaya, tanpa melakukan perbandingan atau pengujian hipotesis secara kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti melalui pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Nilai Pancasila pada Masa Kerajaan

Menurut sejarah, kira-kira pada abad ke VII-XII bangsa Indonesia mendirikan kerajaan telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan kemudian pada abad ke XIII-XVI didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi syarat-syarat suatu bangsa yang mempunyai negara. Kedua kerajaan itu merupakan negara-negara berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh nusantara ini. Pada zaman tersebut, kedua kerajaan itu mengalami kehidupan masyarakat yang sejahtera.

a. Masa Kerajaan Sriwijaya

Pada abad ke VII berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan wangsa Syailendra. Kerajaan yang berbahasa Melayu Kuno dengan menggunakan huruf pallawa tersebut dikenal juga sebagai kerajaan maritime yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda, kemudian Selat Malaka. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, dimana pemerintahan melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat sehingga rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Dalam sistem pemerintahan sudah terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan Gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga saat itu kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. Dasar-dasar Pancasila, yaitu:

- 1) *Ketuhanan yang maha esa*
- 2) *Kemanusiaan yang adil dan beradap*
- 3) *Persatuan Indonesia*
- 4) *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*
- 5) *Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia*

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila, yaitu; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan social telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia, yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu, hanya saja belum dirumuskan secara konkret. Dokumen tertulis yang membuktikan terdapatnya unsur-unsur tersebut adalah prasasti-prasasti di Talang Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur.

Pada hakikatnya nilai nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Budha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Budha.
- 2) Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India (Dinasti Harsha). Pengiriman para pelajar untuk belajar di India. Telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif.
- 3) Nilai sila ketiga, sebagai negara maritime, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara
- 4) Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi (Indonesia sekarang) Siam, dan Semenanjung Melayu.
- 5) Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

b. Masa Kerajaan Majapahit

Sebelum kerajaan Majapahit berdiri telah muncul kerajaan- kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu kerajaan Kalingga (abad ke-VII) dan Sanjaya (abad ke-VIII), sebagai refleksi puncak budaya dari kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur (candi agama Budha pada abad ke-IX) dan Candi Prambanan (candi agama Hindu pada abad ke-X). Di Jawa Timur muncul juga kerajaan-kerajaan, yaitu Isana (abad ke-IX), Dharmawangsa (abad ke-X), dan Airlangga (abad ke- XI). Agama yang diakui kerajaan adalah agama Budha, agama Wisnu, dan agama Syiwa yang telah hidup berdampingan secara damai. Nilai- nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini, terbukti menurut prasasti Kelagen bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dangan dan bekerjasama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Nilai- nilai sila keempat telah terwujud yaitu dengan diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dengan rakyat dan kaum Bramhana. Sedangkan nilai-nilai keadilan social terwujud pada saat Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat.

Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku *Negarakertagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila disamping mempunyai arti "*berbatu sendi lima*" (dalam Bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti "*pelaksana kesusilaan yang lima*" (Pancasila Krama).

- 1) *Tidak boleh melakukan kekerasan.*
- 2) *Tidak boleh mencuri.*

- 3) *Tidak boleh berjiwa dengki.*
- 4) *Tidak boleh berbohong.*
- 5) *Tidak boleh mabuk minuman keras.*

Pada abad ke-XIII, berdiri kerajaan Singasari di Kedi, Jawa Timur, yang ada hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit (1293). Zaman keemasan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya.

- 1) Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah terbukti pada waktu Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai. Empi Prapanca menulis *Negarakertagama* (1365) yang didalamnya telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku *Sutasoma* di mana dalam buku itu terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi "Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharna Mangrua" artinya walaupun berbeda-beda, namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda. Hal ini menunjukkan realitas beragama pada saat itu. Seloka toleransi ini juga diterima kerajaan oleh Kerajaan Pasai di Sumatera sebagai bagian Kerjaan Majapahi yang telah memeluk agam Islam.
- 2) Sila kemanusiaan telah terwujud, yaitu hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa, dan Kamboja. Disamping itu, juga mengadakan persahabatan dengan negara-negara atas dasar MitrekuSatuta.
- 3) Perwujudan nilai-nilai perstauan Indonesia telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada yang diucapkannya pada siding Rat dan Menteri-menteri pada tahun 1331, yang berisi tentang cita cita mempersatukan nusantara raya yang berbunya "Saya bar akan berhenti puasa makan palapa, jika seluruh nusantara bertakluk dibawah kekuasaan negara, jika gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang. Dhampo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan.
- 4) Sila kerakyatan (keempat) sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga telah dilakukan oleh system pemerintahan Kerajaan Majapahit. Menurut Pasasti Brungbung (1329) dalam tata pemerintahan Majapahit terdapat semaca penasehat kepada kerajaan, seperti Rakyaan I Hino, I Shirika dan 1 Halu yang berarti memmberi nasehat kepada raja. Kerukunan gotong royong dalam kehidupan masyarakat tela menambuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan maslah Bersama. Sedangkan perwujudan sila keadilan social adalah

sebagai wujud dan berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Berdasarkan uraian di tersebut dapat kita pahami bahwa zaman Sriwijaya dan Majapahit adalah sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menggapai cita-citanya.

Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Sistem Penjajahan

Kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah, terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di luar Indonesia, menyebabkan bangsa asing (Eropa) masuk ke Indonesia. Bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai memasuki Indonesia yaitu, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Masuknya Bangsa Eropa seiring dengan kemundurannya Kerajaan Majapahit sebagai akibat dari persilihan dan perang saudara, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan, walaupun pada abad ke-XVI agama Islam berkembang dengan pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, seperti Samudera Pasai, dan Demak, tampaknya tidak mampu membendung tekanan bangsa Eropa memasuki Indonesia.

Bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia ini. Sejak itu, mulailah lembaran hitam sejarah Indonesia dengan penjajahan Eropa pada khususnya Belanda. Masa penjajahan Belanda itu dijadikan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya, sebab pada zaman penjajahan ini apa yang telah dicapai bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang. Kedaulatan negara hilang, persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap, wilayah diinjak-injak penjajah.

a. Perjuangan sebelum abad XX

Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda pada saat itu dilakukan diberbagai daerah yang dipimpin oleh para patriot patriot. Perlawanan bangsa Indonesia tersebut banyak mengalami kegagalan, yang disebabkan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan, tidak adanya kordinasi yang baik antara satu perlawanan dengan perlawanan lain, dan persenjataan yang dimiliki oleh para pejuang Indonesia kalah dalam segi kuantitas maupun kualitas dibanding yang dimiliki penjajah.

b. Kebangkitan Nasional 1908

Sebagai awal dari kebangkitan nasional yang ditandai dengan lahirnya organisasi Boedi Octomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang berjuang untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan

kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Segera setelah lahirnya Boedi Octomo, kemudian lahir organisasi pergerakan lainnya seperti Indische Partij, Serikat Dagang Islam, dan Partai Nasional Indonesia.

c. Sumpah Pemuda 1928

Sebagai salah satu puncak kesadaran nasional bangsa Indonesia adalah lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, berkumpul organisasi. Kepemudaan dan mereka membuat suatu kesepakatan yaitu apabila Indonesia ingin merdeka maka segenap bangsa Indonesia harus bersatu. Untuk itu, mereka mengucapkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.

d. Jaman Penjajahan Jepang

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda "Jepang Pemimpin Asia dan Jepang Saudara Tua Indonesia". Setelah terdesak dalam melawan sekutu, akhirnya Jepang bermurah hati kepada bangsa Indonesia dengan menjanjikan suatu kemerdekaan untuk mendapat dukungan dan simpati bangsa Indonesia. Sebagai realisasi dari janjinya tersebut, dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan (BPUPKI) atau Dokuritzu Zyunbi Tioosakai.

Proses Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas Kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. 7 Agustus 1945 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI berganti nama menjadi PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. 9 Agustus 1945 bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Dan di hari yang sama, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

12 Agustus 1945 Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, berdasarkan tim PPKI. 14 Agustus 1945 Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wedyodiningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Serta di hari yang sama, golongan muda mendsak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat dari para anggota PPK1.16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Mohamad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengasdengklok Karawang dan dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Dan malamnya, Soekarno, Moh Hatta bersama golongan muda mauoun tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi, Soekarno dan Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur no 56. 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Dasar Negara.

Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945

Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia Badan Penyelidik Usaha yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat. Pidato pembukaannya, dr.Radjiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota Sidang. "Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?". Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu:

- a. Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.
- b. Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Soekarno mengemukakan dasar- dasar sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, Kemanusiaan atau internasionalisme, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:
"Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Pancasila. Sila

artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi."

Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu Panitia Kecil untuk:

- a. Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara. Berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
- b. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka.

Dari Panitia Kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia Sembilan, untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah:

- a. Rumusan Pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 1945
- b. Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945
- c. Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949
- d. Rumusan Keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950
- e. Rumusan Kelima: Rumusan Pertama menjiwai Rumusan Kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi (merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959)

Pancasila sebagai dasar negara

Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 196 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama bangsa rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Momerandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.¹ Sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama yaitu, yakni sebagai dasar Negara (*philosophische grondslaag*) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.

Filsafat Pancasila adalah nilai-nilai yang bermanfaat suatu pengetahuan.² Filsafat pancasila memiliki suatu kesatuan dasar yakni, kesatuan yang utuh. Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai yang mengakui, dan menerima, Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai.

Pancasila adalah pandangan yang berkembang dalam sosio-budaya Indonesia.³ Nilai pancasila dianggap nilai dasar dan puncak (*sari-sari*) budaya bangsa, karenanya nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa ini menjiwai dan memberikan watak keperibadian dan identitas sehingga pengakuan atas kedudukan sebagai filsafat.

Pancasila di masa saat ini

Sebagai contoh warga Indonesia yang aktif di organisasi "persaudaraan" ini menyebut tidak adanya keadilan sosial. Para pemimpin negara yang semestinya memakmurkan rakyat, tapi ternyata tidak. Kekayaan rakyat dicuri dan semua amburadul. Indonesia sekarang banyak menghadapi masalah besar Seperti saat ini masalah tentang kekuasaan diperebutkan, berita bohong tentang politik di mana mana. Korupsi semakin merajalela. Hukum dimanipulasi, bukan digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, tapi untuk melindungi penjahat-penjahat atau koruptor-koruptor di kalangan para pengusaha negara, dan juga terorisme.

Kerukunan beragama sebenarnya dituntut oleh Pancasila, juga jauh dari kenyataan di Indonesia saat ini. Dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa masyarakat bebas beragama. Dengan demikian negara Indonesia bisa saling menghargai sesama umat, dan juga bisa terlaksana ibadahnya dengan baik. Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, masyarakat dan negara Indonesia semakin paham untuk tidak melanggar aturan yang ada atau yang ditegakan oleh pemerintah. Pemerintah adalah orang yang mengatur segala lalu lintas yang yang membuat aturan-aturan yang ada. Maka dari itu masyarakat dan negara

¹Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan ketetapan MPR No. IX/MPR/1978

² *Dewantara* (2017:13)

³ *Darmodiharjo* (1985: 22)

Indonesia semakin jaya, dan menghormati aturan yang ada, yakni aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan sila ketuhanan ini negara Indonesia tidak ikut campur dalam aturan agama, Karena setiap agama mempunyai aturan-aturan yang ditegakkan oleh umat. Oleh sebab itu warga negara atau masyarakat Indonesia semakin jaya dan saling menghargai dan menghormati agama, dan sekaligus masyarakat bisa melaksanakan ibadahnya atau kepercayaannya masing-masing.

Pemerintah merupakan suatu bentuk yang ideal dalam memerintah negara. Menurut demokrasi memiliki nilai yang baik bukan dalam konteks tetapi melainkan kebaikan yang dibuat oleh pemerintah Dan tidak semua yang dikehendaki oleh kaum golongan tetapi semuanya rata tidak ada yang milih. Dalam kelompok masyarakat yang menyebut diri mayoritas, aparat yang bertanggungjawab terhadap keamanan atau kestabilan pemerintah yang tidak bisah buat banyak. Tindakan yang menyalagunakan paham demokrasi yaitu pemerintah yang menyoritas paling pada umumnya yang menjadi kerap berasal dari paham bahwa demkorasi menjunjung titing kebebasan hak manusia.

Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tentu ada dalam suatu posisi filosofis tertentu. Artinya, pidato ini ada dalam konteks pidato-pidato para tokoh yang lain (yang tentunya mempunyai posisi filosofis dan ideologis yang berbeda). Pada sidang yang pertama (31 Mei 1945), Soepomo menguraikan tiga teori tentang berdirinya suatu negara. Aneka teori tersebut adalah teori individualistis (dengan Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Herbert Spencer, dan Laski sebagai pijakan filosofisnya), teori golongan/kelas (dengan Marx, Engels, dan Lenin sebagai filosof rujukannya), dan teori integralistik (dengan Spinoza, Adam Muller, dan Hegel sebagai pijakan filosofisnya) Menurut Soepomo, Indonesia haruslah merupakan negara integralistik. Mengapa? Karena dalam negara integralistik inilah ada persatuan antara pemimpin dan rakyatnya

Negara seperti ini cocok dengan aliran pikiran ketimuran dan masyarakat Indonesia yang ada dalam adat. Dengan kata lain, Soepomo hendak mengatakan bahwa negara integralistik khas Indonesia mempunyai pijakan filosofis yang jelas. Ideologi yang hendak ditolak bagi bangunan Indonesia merdeka, menurut Soepomo, dengan demikian adalah federalisme (yang encuatkan keterpecahan) dan individualisme-liberalisme (yang menekankan kebebasan mutlak bagi individu), dan juga monarki. Pada pidato berikutnya. M. Yamin juga mengatakan bahwa Indonesia baru nanti menolak paham federalisme, feodalisme, monarki, liberalisme, autokrasi, birokrasi, dan demokrasi khas barat. Dari sini saja tampak bahwa ada "perang ideology" dalam konteks kemerdekaan Indonesia.

Dunia saat itu memang dilanda perang ideologi antara Barat yang menjunjung tinggi liberalisme dan Timur yang mempromosikan sosialisme. Para founding fathers tentu amat mengerti hal itu dan mencari pijakan filosofis dan sekaligus ideologis yang memadai bagi berdirinya Indonesia merdeka. Dari sini bisa dimengerti mengapa Soepomo mengajukan Hegel, Spinoza, dan Adam Muller bagi integralisme Indonesia (meskipun patut diperdebatkan 53 apakah ketiga filosof tersebut berbicara mengenai negara integralistik). Pada bingkai itulah Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai Pancasila.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaannya yang tua, melalui gemilangnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, kemudian mengalami masa penjajahan tiga setengah abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Berbagai babak sejarah telah dilampaui dan berbagai jalan telah ditempuh dengan cara yang berbeda-beda, mulai dengan cara yang lunak sampai cara yang keras, mulai dari gerakan kaum cendekiawan yang terbatas sampai pada gerakan yang menghimpun kekuatan rakyat banyak, mulai dari bidang pendidikan, kesenian daerah, perdagangan sampai pada gerakan-gerakan politik.

Bangsa Indonesia lahir sesudah melalui perjuangan yang sangat panjang, menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara, "Pancasila".

Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia, oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia mulai menerapkan nilai-nilai pada Pancasila tersebut baik di daerah maupun di pusat Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat menyadari betapa pentingnya Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia. Maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila Pancasila tersebut.

Dasar negara adalah suatu yang ada dalam masyarakat yang membentuk suatu negara maka disebut dengan dasar negara. Dasar nagar ini bisa terbentuk adanya suatu undang-undang dasar 1945 yang ada di suatu pembukaan. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat.

Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 196 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama bangsa rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Dahm, B. (1987). *Sukarno dan perjuangan kemerdekaan* (alih bahasa oleh Hasan Basari). Jakarta.
- Dewantara, A. (2017, August 8). Diskursus filsafat Pancasila dewasa ini. <https://doi.org/10.31227/osf.io/t54au>
- Dewantara, A. (2017, July 17). Alangkah hebatnya negara gotong royong (Indonesia dalam kacamata Soekarno). <https://doi.org/10.31227/osf.io/e7cqk>
- Dewantara, A. (2018, September 18). Alangkah hebatnya negara gotong royong (Indonesia Soekarno). <https://doi.org/10.31227/osf.io/c7cqk>
- Karno, S. (2017). *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Presindo Media.
- Notonagoro, I. (1971). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tujuh.
- Soekarno, S. (2008). *Pancasila dasar negara*. Adytia Media Yogyakarta.